

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Kecil Menengah (UKM) merujuk pada sektor bisnis yang mencakup berbagai kegiatan ekonomi, produksi, dan pelayanan yang dijalankan oleh pelaku usaha dengan skala yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. UKM menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, menyumbang secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks bisnis, UKM dapat mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari industri manufaktur, perdagangan, hingga jasa. Meskipun memiliki skala yang lebih kecil, UKM seringkali memiliki fleksibilitas dan keberagaman yang memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan pasar dengan lebih cepat. Dalam banyak negara, dukungan terhadap pengembangan dan pertumbuhan UKM dianggap sebagai strategi penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000, – (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000, – (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Sebelum munculnya pandemi COVID-19, sektor UKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi. Namun, setelah pandemi, banyak UKM menghadapi tantangan serius seperti penurunan pendapatan, kesulitan operasional, dan penyesuaian terhadap perubahan pola konsumen. Pemerintah berupaya memberikan dukungan melalui program stimulus dan bantuan untuk membantu pemulihan sektor UKM pasca-pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau setara dengan Rp 9.580 triliun, dan kontribusi UKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja. Data ini menunjukkan bahwa UKM memiliki pertumbuhan yang cukup pesat serta memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh UKM saat ini di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan, adalah kendala dalam memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Keterbatasan modal sering kali menjadi hambatan yang signifikan, membatasi kemampuan UKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Selain permasalahan modal, UKM juga menghadapi kesulitan dalam aspek manajemen usaha, termasuk manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Keberhasilan UKM dalam mengelola aspek-aspek tersebut dapat berdampak langsung pada daya tahan dan pertumbuhan bisnis mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Meskipun UKM memiliki potensi yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas UKM belum sejalan dengan potensi tersebut, terutama dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangan, yang merupakan faktor kunci keberhasilan. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh UKM

adalah kurangnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang memadai dan bersifat sangat sederhana.

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 mengenai survei awal penelitian pada UKM di Kabupaten Kuningan sebanyak 30 UKM didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Hasil Survei Awal**

| No | Nama UKM                 | LAPORAN KEUANGAN YANG DIMILIKI |           |                               |
|----|--------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
|    |                          | NERACA                         | LABA RUGI | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN |
| 1  | Bengkel Auto Scan        | x                              | ✓         | ✓                             |
| 2  | Bengkel Motor            | x                              | ✓         | x                             |
| 3  | Servis Elektronik        | x                              | ✓         | x                             |
| 4  | Casma Gas Lpg            | x                              | ✓         | x                             |
| 5  | Peternakan Pak Karto     | x                              | ✓         | x                             |
| 6  | Konveksi                 | x                              | ✓         | x                             |
| 7  | Konveksi Lotta Colection | x                              | ✓         | x                             |
| 8  | Penjahit Pakaian         | x                              | ✓         | x                             |
| 9  | Ternak Domba             | x                              | ✓         | x                             |
| 10 | Peternak Lele            | x                              | ✓         | x                             |
| 11 | Ternak Sapi Naripan      | x                              | ✓         | x                             |
| 12 | Perikanan                | x                              | ✓         | x                             |
| 13 | Ternak Ayan              | x                              | ✓         | x                             |

|    |                            |   |   |   |
|----|----------------------------|---|---|---|
| 14 | Ternak Ayam                | x | ✓ | x |
| 15 | Perikanan                  | x | ✓ | x |
| 16 | Konveksi Lili Suali        | x | ✓ | x |
| 17 | Budidaya Ikan              | x | ✓ | x |
| 18 | Konveksi Mekar<br>colecton | x | ✓ | x |
| 19 | Produksi Bata<br>Merah     | x | ✓ | x |
| 20 | Pedagang Kambing           | x | ✓ | x |
| 21 | Pandai Besi Sartika        | x | ✓ | x |
| 22 | Ternak Kambing             | x | ✓ | x |
| 23 | Bengkel Mobil Uud          | x | ✓ | x |
| 24 | Bengkel Motor              | x | ✓ | x |
| 25 | Tukang Kayu                | x | ✓ | x |
| 26 | Toko Pertanian             | x | ✓ | x |
| 27 | Produksi Bata<br>Merah     | x | ✓ | x |
| 28 | Bengkel Mobil              | x | ✓ | x |
| 29 | Jual Beli Mobil            | x | ✓ | x |
| 30 | Bengkel Motor<br>Rasta     | x | ✓ | x |

*(Sumber responden)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa survei terhadap 30 UKM di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa terdapat beberapa ukm yang memiliki pelaporan keuangan diantaranya, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam survei ini, sebagian besar UKM telah menghasilkan laporan keuangan yang mencakup elemen-elemen seperti, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, namun tidak sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang dihadapi oleh UKM, seperti kurangnya keterampilan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap bidang akuntansi. Sebagian besar UKM hanya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, serta jumlah piutang dan hutang tanpa menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan masih belum mampu mencerminkan secara akurat informasi keuangan yang sebenarnya di dalam UKM tersebut.

Kurangnya pemahaman para pelaku UKM mengenai bidang akuntansi dan standar akuntansi keuangan menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh UKM di Indonesia. Kesulitan ini menyulitkan UKM untuk membuat dan mengelola laporan keuangan dengan efektif. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih simpel SAK EMKM. Langkah ini diambil karena masih banyaknya UKM di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pada tanggal 1 Januari 2018, SAK EMKM efektif diberlakukan sebagai standar yang bisa membantu sekitar 57.900.000 pengusaha UKM di Indonesia. SAK EMKM memang ditujukan kepada UKM agar semakin mudah dalam menyusun serta membuat laporan keuangan, karena SAK EMKM ini jauh lebih sederhana dari SAK ETAP (Diana, 2018:67).

Menyadari tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, diperlukan inovasi sebagai solusi. Keberadaan SAK EMKM yang dikeluarkan oleh IAI memberikan kemudahan bagi UKM. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) telah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada rapatnya pada 18 Mei 2016. SAK EMKM membantu pelaku UKM dalam menerapkan prinsip akuntansi dalam usaha mereka, memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar menjadi lebih mudah. Meskipun SAK EMKM tergolong sebagai

standar sederhana, namun tetap dapat memberikan informasi keuangan yang handal dan akurat dalam penyajian laporan keuangan.

Faktor pertama yang memengaruhi pelaporan keuangan di kalangan UKM yaitu salah satunya adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merujuk pada aktivitas individu untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan pola perilaku, yang dapat dicapai melalui berbagai organisasi atau tanpa keterlibatan organisasi, untuk membentuk aspek kehidupan masa depan. Lestari dkk (2018:13) menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan pada UKM disebabkan karena UKM menggunakan sumber daya dengan kualifikasi yang sebanding dengan lulusan SMA, Oleh karena itu, tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan pada kemajuan UKM. Meskipun demikian, ketika UKM merekrut tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, tantangan muncul terkait dengan keterbatasan pendapatan UKM yang belum mencukupi untuk memenuhi tingkat gaji dan bonus yang tinggi bagi para tenaga kerja tersebut.

Hasil penelitian Okta Suci Jayanti & Febriyanto (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan ukm. Sedangkan penelitian Dini Budiarti,Rd. Ade Tribuana Anjaya, & Ronald N Girsang (2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap pelaporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Faktor kedua yang mempengaruhi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah pemahaman akuntansi karena pemahaman akuntansi memegang peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk UKM. Lebih dari sekadar merekam transaksi keuangan, pemahaman akuntansi melibatkan interpretasi dan analisis mendalam terhadap data keuangan yang terdokumentasi dalam laporan keuangan. Dengan pemahaman yang tepat mengenai prinsip-prinsip akuntansi, UKM dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, pemahaman akuntansi juga memberikan kapabilitas kepada UKM untuk mengelola risiko keuangan dengan lebih efisien, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan

menjaga keberlanjutan bisnis. Secara keseluruhan, keterkaitan yang erat antara pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan memberikan fondasi yang kuat bagi kesuksesan UKM dalam mengelola aspek keuangan mereka, sekaligus memperkuat kepercayaan dari pihak-pihak terkait seperti investor, pemberi pinjaman, dan mitra bisnis.

Menurut Anaan (2020), pemahaman akuntansi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menguasai prosedur pelaksanaan akuntansi sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi. Friyani (2020) melengkapi pemahaman akuntansi dengan menyebutkan bahwa pengetahuan ini dapat diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan, baik secara formal maupun non-formal melalui pelatihan dan kursus. Dengan memahami dasar-dasar akuntansi, seseorang dapat lebih mudah memahami serta mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi dalam praktiknya. Oleh karena itu, kehadiran tenaga akuntan yang memiliki kompetensi dan keterampilan dianggap sangat krusial sebagai penentu kebijakan yang tepat dalam konteks akuntansi.

Hasil penelitian Artana (2016) mengatakan pemahaman akuntansi tidak mempengaruhi secara signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Lestari & Dewi (2020) mengatakan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan. Dan didukung oleh penelitian Andriansyah et al. (2022) dan Sopanah et al. (2023) mengatakan pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang memengaruhi pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan. Pelatihan tersebut memiliki peranan yang sangat signifikan bagi individu yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan, karena membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, pemahaman para pelaku UKM terkait Standar SAK EMKM masih kurang. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah serta minimnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dan

lembaga yang menaungi UKM, sehingga pemahaman mengenai pentingnya pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM masih belum tersampaikan dengan baik kepada pelaku UKM.

Hasil Penelitian Okta Suci Jayanti & Febriyanto (2023) dan didukung dengan penelitian Wicaksono (2016) hasil penelitian menunjukkan keikutsertaan dalam program pembinaan pelatihan berpengaruh terhadap pentingnya pelaporan keuangan .

Berdasarkan fenomena dari penelitian yang telah dijelaskan pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan secara simultan mempengaruhi pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM, maka peneliti tertarik untuk memulai penelitian dengan judul **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UKM Berdasarkan SAK EMKM.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM ?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM ?
4. Bagaimana pengaruh pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pemahaman :

1. Pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akutansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM.
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM.
3. Pengaruh pemahaman akutansi terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM.
4. Pengaruh pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UKM berdasarkan SAK EMKM

### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat penting bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

##### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akutansi mengenai kualitas laporan keuangan dan faktor faktor yang mempengaruhi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Pelaku UKM**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga para pelaku UKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan SAK EMKM

## **2. Bagi Pemerintah**

Semoga penelitian ini dapat memberikan referensi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan laporan keuangan UKM agar sesuai dengan SAK EMKM melalui tingkat pendidikan, pemahaman akutansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan.

## **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi tingkat pendidikan, pemahaman akutansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan bagaimana faktor faktor tersebut mempengaruhi laporan keuangan yang sesuai berdasarkan SAK EMKM.